



Memahami Secara Teologis Politik Dalam Gereja

Adi Putra

Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia
Email: addiepoetra7@gmail.com

Gunar Sahari

Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia
Email: gunarsahari@gmail.com

Charisal B.S. Manu

Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia
Email: charisalmanu@gmail.com

Filmon Berek

Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia
Email: filmonberek@gmail.com

Article history:

Submit: April 27, 2023

Revised: May 25, 2023

Accepted: June 25, 2023

Published: June 09, 2023

Keywords: Church,
Kingdom of God, Politics,
Theocracy

Kata kunci: Gereja,
Kerajaan Allah, Politik,
Teokrasi

Abstract: This research is about the study of political practices in the church. This topic is interesting to study, because so far there have been so many church members who refuse to get involved in practical politics. They think politics is dirty and against the principles contained in the Bible. But not a few also think that church members are obliged to be actively involved in politics. These pros and cons are examined in this article. To find out the political nature of what the church should do. Through this research it was found that in fact there is politics that can be applied in the Church, and that is what is called theocratic politics. Using a qualitative approach, the researcher examines this topic from a theological perspective. The researcher finds several points as conclusions related to theocratic politics as church politics, then about the nature of theocratic politics, and the application of theocratic politics that can be applied inside and outside the church.

Abstrak: Penelitian ini berisi tentang kajian terhadap praktik politik di dalam gereja. Topik ini menarik untuk diteliti, karena selama ini terdapat begitu banyak warga gereja menolak terlibat dalam politik praktis. Mereka beranggapan politik itu kotor dan bertentangan dengan prinsip yang terdapat dalam Alkitab. Namun tidak sedikit pula yang menganggap bahwa warga gereja wajib untuk terlibat aktif dalam politik. Pro-kontra inilah yang diteliti dalam artikel ini. Untuk mencari tahu sifat politik yang seperti apa yang harus dilakukan oleh gereja. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa ternyata ada politik yang dapat diterapkan dalam Gereja, dan itu yang disebut dengan politik teokrasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti mengkaji topik ini dari perspektif teologis. Peneliti menemukan beberapa poin sebagai kesimpulan yang terkait dengan politik teokrasi sebagai politik gereja, kemudian tentang sifat politik teokrasi, dan penerapan politik teokrasi yang dapat diterapkan dalam dan di luar gereja.

Pendahuluan

Masyarakat seringkali melihat dan menilai politik sebagai hal yang negatif. Penilaian ini tidak terlepas dari sikap dan perilaku yang acapkali diperlihatkan oleh para politisi yang justru tidak menunjukkan integritas serta kualitas dalam berpolitik. Gianto mengatakan, politik adalah aktivitas yang diijinkan Tuhan. Meskipun demikian, ada yang berpendapat bahwa Politik itu kotor. Oleh karena itu, Pandangan bahwa politik itu kotor, perlu diluruskan dalam pemahaman umat. Politik itu netral, hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Politik dari kata polis berarti negara/kota, polites (warganegara), politikos (kewarganegaraan, *civics*), politiketechne (kemahiran berpolitik), dan politike episteme (ilmu politik). Politik adalah seni kemungkinan dalam mengatur warga kota/Negara.¹

Seperti yang dikemukakan juga dalam LPM Pendapa bahwa, kondisi sekarang mayoritas masyarakat beranggapan politik itu tidak baik. Politik selalu diindentikkan dengan penipuan, kebohongan, akal-akalan, permusuhan, atau hal-hal yang semuanya itu bisa berakibat buruk. Masyarakat berasumsi bahwa semua orang yang masuk dalam dunia politik itu akan turut bertindak kotor dan tidak berperikemanusiaan. Sekalipun faktanya tidak semua tentang politik itu buruk, namun penilaian dari masyarakat yang sudah terlanjur bengkok dan sulit untuk diubah. Masyarakat akan selalu mengatakan bahwa politik itu harus di jauhi. Itulah yang mengakibatkan terjadinya penurunan dan ambruknya kepercayaan masyarakat mengenai politik.²

Berdasarkan hasil survei pada tahun 2022, sekalipun menunjukkan adanya peningkatan tren positif terhadap persepsi masyarakat terhadap politik, namun persentase yang memberikan penilaian negatif atau buruk terhadap politik masih sangat tinggi. Persepsi ini juga turut mempengaruhi masyarakat gereja menilai atau mempersepsikan politik. Tidak sedikit warga gereja berpendapat bahwa gereja haruslah dipisahkan dari politik. Seperti yang dikemukakan oleh Daulat Tambunan, gereja harus dipisahkan dengan politik praktis, bukan dari politik sebagai ilmu dan wacana demi pembangunan bangsa dan negara. Kegiatan gerejawi harus dipisahkan dari kegiatan politik. Tidak boleh dicampuradukkan. Gereja adalah gereja dan partai politik adalah partai politik.³

Itulah sebabnya, Haris Jo mengatakan, gereja seharusnya tidak berpolitik praktis. Bukan karena politik itu kotor dan gereja itu suci, tetapi untuk menjaga netralitas dan kesaksian gereja yang harus menyuarakan suara kenabian bagi pihak-pihak yang terlibat politik.⁴ Akan tetapi Adolf Bastian Simamora justru mengatakan hal yang sebaliknya dengan mengatakan, warga gereja seharusnya tidak

¹ Gianto Gianto, "Hamba Tuhan Dan Politik Praktis: Kajian Teologis-Etis Terhadap Panggilan Hamba Tuhan Dan Keterlibatannya Dalam Politik Praktis Dalam Konteks Indonesia," *Coram Mundo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 2 (2021): 59–64.

² LPM Pendapa, "Pandangan Masyarakat Mengenai Politik," *Pendapa.Com*, last modified 2016, accessed March 21, 2023, <https://lpmpendapa.com/opini/pandangan-masyarakat-mengenai-politik/>.

³ Daulat Tambunan, "Bolehkah Gereja Berpolitik?," *Binus University*, last modified 2021, accessed March 21, 2023, <https://binus.ac.id/character-building/2021/02/bolehkah-gereja-berpolitik/>.

⁴ Haris Jo, "Bolehkah Gereja Berpolitik?," *Rubrik Kristen*, last modified 2022, accessed March 21, 2023, <https://rubrikkristen.com/bolehkah-gereja-berpolitik/>.

perlu merasa “tabu” berbicara tentang politik, atau mengatakan bahwa politik itu bukan urusan gereja dengan alasan dapat mencemarkan kekudusan gereja. Ketika tinggal di bumi, Yesus sendiri tidak menghindari dari kegiatan politik. Ia pernah ditanya oleh orang-orang Farisi dan Herodian tentang pajak, “Katakanlah kepada kami pendapat-Mu: Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?” (Mat. 22:17). “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Mat 22:21).⁵

Jadi Gereja harus memiliki sikap yang jelas dan tegas dalam menyikapi politik praktis. Di satu sisi, ada pandangan yang mengatakan Gereja tidak boleh berpolitik karena politik itu kotor. Akan tetapi tidak sedikit juga yang menganggap bahwa gereja harus berpolitik, supaya dapat menjadi garam dan terang dalam lingkungan politik. Ketika Gereja harus terlibat dalam politik praktis, maka Gereja harus mempraktikkan politik teokrasi. Itulah sebabnya rumusan masalah dalam penelitian adalah Gereja yang berpolitik baik secara personal maupun lembaga diharapkan dapat menerapkan politik teokrasi. Dan diduga bahwa politik teokrasi merupakan sifat politik yang identik dengan politik praktis Gereja dan harus dipraktikkan oleh gereja baik secara internal maupun eksternal. Dengan demikian pada penelitian ini dikaji dan diteliti tentang politik yang dipraktikkan dalam Gereja. Supaya dapat memberikan sumbangsih pemikiran demi menambah wawasan dan referensi bagi masyarakat gereja tentang politik dan boleh tidaknya gereja terlibat dalam politik.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Alasan menggunakan penelitian kualitatif, karena seperti yang dikemukakan oleh Uwe Flick, Ernst von Kardoff dan Ines Steinke bahwa penelitian kualitatif ini dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang realitas sosial dan memfokuskan diri pada proses, pola-pola makna, dan ciri-ciri struktural.⁶ Itulah sebabnya pada penelitian ini proses pengambilan data dan pengolahannya menjadi hal yang sangat diperhatikan dan ditekankan oleh peneliti supaya dapat memperoleh kesimpulan yang valid dan representatif. Ada pun yang dilakukan oleh peneliti adalah mengkaji dan menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari berbagai literatur atau pustaka. Sehingga dari setiap informasi itu dianalisis dan sintaksiskan untuk menemukan jawaban terhadap beberapa pertanyaan inti yang muncul dalam penelitian. Sekaligus membangun sebuah teori baru yang dihasilkan dari kajian ini.

⁵ Adolf Bastian Simamora, “Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia,” *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2, no. 1 (2018).

⁶ Ines Steinke Uwe Flick, Ernst von Kardoff, “Apakah Penelitian Kualitatif? Pengantar Bidang Kajian,” in *Buku Induk Penelitian Kualitatif: Paradigma, Teori, Metode, Prosedur Dan Praktik*, ed. Ernst von Kardoff dan Ines Steinke Uwe Flick (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2017), 21.

Hasil dan Pembahasan

Gereja minimal memiliki tiga pandangan terhadap politik. Pandangan pertama, apolitik. Di mana tidak dapat dipungkiri bahwa ada kesenjangan antara gereja atau orang Kristen dengan negara dewasa ini. Kesenjangan yang terjadi antara orang Kristen dengan negara dapat dilihat dari adanya sebagian jemaat Kristen yang anti-pemerintah/negara (Apolitik), politik dianggap kotor, dan pemerintah dianggap mendiskreditkan gereja/orang Kristen. Gereja dan warga Kristen di Indonesia yang meninggalkan persepsi (warisan *Pietisme*) ini, namun dalam batas tertentu masih banyak warga yang menganut pandangan yang demikian. Masih banyak pemimpin dan warga gereja yang Apolitik. Walau gereja bukanlah kekuatan politik, tetapi kekuatan moral namun sikap apolitik terlalu ekstrim.⁷

Pandangan kedua, perebut kekuasaan. Kelompok ini ingin merebut kekuasaan politik atau paling sedikit mempunyai kekuatan signifikan dalam bentuk struktur pemerintahan agar dapat menentukan jalannya negeri ini. Sikap seperti ini lahir dari pengalaman pahit penganut pandangan di mana orang Kristen di Indonesia dianggap sedang dimarginalkan bahkan dianiaya. Untuk membela nasib orang Kristen di Indonesia penganut pandangan ini “Bermimpi” untuk masuk dalam struktur kekuasaan dalam rangka menentukan arah pemerintahan. Dan pandangan yang ketiga adalah alat Kristus. Orang Kristen di Indonesia terpanggil sebagai garam dan terang dunia yang melalui iman Kristianinya dapat melakukan transformasi politik secara positif, kritis, kreatif, dan realistis.⁸

Pandangan ketiga, alat Kristus. Di mana orang Kristen di Indonesia terpanggil sebagai garam dan terang dunia yang melalui iman Kristianinya dapat melakukan transformasi politik secara positif, kritis, kreatif, dan realistis.⁹

Sifat Politik Gereja

Pada bagian ini akan dibahas tentang sifat dari politik Gereja atau politik yang harus dipraktikkan dalam gereja. Pada penelitian ini, hendak dijelaskan tentang politik yang dipraktikkan dalam Gereja adalah politik teokrasi. Politik teokrasi adalah politik yang hendak menegakkan kedaulatan Allah dan menempatkan Allah sebagai Raja. Politik ini identik dengan prinsip penegakan aturan kerajaan Allah di dunia ini. Oleh karena ketika kerajaan Allah dapat ditegakkan maka secara tidak langsung menegakkan politik teokrasi. Akan tetapi politik seperti apa yang harus dipraktikkan oleh Gereja? Pada penelitian ini disebut sebagai politik teokrasi. Politik teokrasi merupakan sebuah sistem politik yang pada praktiknya berpegang pada kebenaran dan kehendak Allah. Kata “politik” menurut Aristoteles berarti pengetahuan tentang kota, dan yang dimaksud dengan kota adalah Negara kota, yaitu bentuk ideal dari komunitas manusia yang secara alami dikondisikan dan mengekspresikan diri guna memenuhi kebutuhan hidup bersama, sebagaimana diungkapkan oleh Paul Lehmann

⁷ Ni Nyoman Fransiska, “Entitas Gereja Dalam Berpolitik Di Indonesia (Tinjauan Sudut Etika Kristen),” *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* (2018): 1–15.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

“Politics is the science of polis although concretely it is the city-state, is always also the ideal form of human, association which is by nature the precondition for and the expression of the fulfillment of human life.”¹⁰ Berikut ini beberapa hal yang perlu diketahui tentang politik teokrasi.

1. Politik teokrasi menegakkan kedaulatan dan kehendak Allah di dalam dunia

Politik teokrasi yang diterapkan oleh Gereja harus menegakkan kedaulatan Allah. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Theodorus Miraji yang mengatakan bahwa, politik teokrasi adalah Allah yang menjadi sentral dan yang utama dalam setiap praktik kehidupan umat-Nya. seperti yang tampak dalam Perjanjian Lama, di mana Allah begitu sentral dan penting bagi kehidupan bangsa Israel.¹¹ Menurut Tony Evans, kedaulatan Allah berkaitan dengan peraturan-Nya dan pengawasan-Nya yang mutlak atas segala ciptaan-Nya. Allah menguasai secara mutlak kejadian dan peristiwa manusia. Sebagai Allah Dia duduk di atas takhta semesta alam. Segala sesuatu terjadi, terlaksana entah karena secara langsung disebabkan-Nya atau dengan sadar diizinkan-Nya. Tiada sesuatu pun yang masuk dalam atau ada di luar sejarah yang tidak ada dalam pengawasan Allah yang sempurna.¹²

Berkhof menambahkan dengan mengatakan bahwa kedaulatan Allah dalam hubungannya dengan karya penciptaan-Nya maka langit dan bumi dan segala sesuatu adalah milik-Nya. Ia berjubahkan otoritas mutlak atas malaikat-malaikat di surga dan manusia di bumi. Ia memegang segala sesuatu dalam kuasa-Nya, dan menentukan akhir dari segalanya sebagaimana mereka telah ditentukan untuk demikian. Ia memerintah sebagai Raja dalam arti yang sebenar-benarnya, dan segala sesuatu tergantung pada-Nya, dan segalanya harus melayani Dia.¹³ Dengan demikian dapat dipahami bahwa kedaulatan Allah sebenarnya hendak menegaskan bahwa Allah berkuasa mutlak atas seluruh alam semesta ini. Karena Allah adalah pencipta dan pemelihara seluruh kehidupan bahkan Allah adalah Rajanya. Menegakkan kedaulatan Allah berarti melaksanakan hak-Nya untuk melakukan apa yang disukai-Nya atas ciptaan-Nya. Dan ini menjadi tugas semua manusia yang Allah ciptakan segambar dan serupa dengan-Nya. Supaya manusia dapat menjadi *wakil* Allah di dunia ini untuk menegakkan kedaulatan dan kehendak-Nya. Namun manusia itu gagal dijalankan oleh manusia saat manusia jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya, Allah harus memilih atau menghususkan satu bangsa yakni Israel, di mana melalui bangsa ini nantinya kedaulatan Allah itu dapat ditegakkan. Kalau belajar sejarah bangsa Israel, sebelum mereka menjadi bangsa monarki, mereka sebelumnya adalah bangsa yang teokrasi. Tidaklah keliru apabila dikatakan bahwa bangsa Israel pernah menolak berada di bawah sistem pemerintahan teokrasi.

¹⁰ William Wahyu Sembiring, “Kajian Historis-Kritis Tentang Teokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Teologi Gracia Deo* 5, no. 1 (2022): 87–107.

¹¹ Theodorus Miraji, “Pengaruh Keadaan Politik Terhadap Konsep Kerajaan Mesianik Pada Masa Intertestamental,” *LOGIA: Jurnal Teologi Pentakosta* 2, no. 1 (2020): 42–61.

¹² Tony Evans, *Teologi Allah: Allah Kita Maha Agung* (Malang: Gandum Mas, 1999), 105-106.

¹³ Louis Berkhof, *Teologi Sistematis 1 – Doktrin Allah* (Surabaya: Momentum, 1993), 128.

Pada penelitian sebelumnya ditemukan bahwa ketika bangsa Israel meminta raja kepada Samuel adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan juga terkandung jelas dalam kata *נָסָה*. HALOT mengartikan kata ini dengan *to refuse, reject*; dan dalam konteks 1 Samuel 8:7 jelas di situ menunjuk kepada penolakan terhadap Allah (bdk. Bil. 11:20).¹⁴ Pendapat ini didukung oleh Iman Kurniadi dan Rohana bahwa, di dalam 1 Samuel 8:7, Israel menolak Allah sebagai penguasa tunggal dan pemimpin mereka. Dalam hal ini, Israel gagal dalam menaati Allah dan hukum-hukum-Nya. Artikel penelitian ini akan membahas hal-hal yang melatarbelakangi berdirinya Israel sebagai sebuah monarki pada zaman nabi Samuel.¹⁵ Bahkan tendensi yang sama juga muncul lagi dalam 1 Samuel 10: 19 yang berbunyi: “Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari malapetaka dan kesusahanmu, dengan berkata: tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan TUHAN, menurut sukumu dan menurut kaummu.”

Yudhy Sanjaya menjelaskan bahwa, bentuk pemerintahan yg teokrasi menerima tanggapan dan protes menurut umat Israel sendiri dalam masa Hakim Samuel, di mana mereka sangat menginginkan seseorang raja misalnya bangsa-bangsa lain yg sudah memiliki raja terlebih dahulu.¹⁶ Sekalipun bangsa Israel juga dapat dikatakan gagal menjalankan politik teokrasi ini. Bahkan kegagalan Israel terlihat ketika menolak Yesus, karena bagi mereka Mesias itu adalah Raja politis (politis dalam perspektif dunia). Seperti yang dikisahkan dalam Yohanes 6:15. Sikap Yesus ini dapat direfleksikan dalam konteks politik dengan sebuah ajaran bahwa untuk berbuat sesuatu bagi masyarakat dan umat tidak perlu harus menjabat, karena tanpa jabatan pun, apabila kita memang punya keinginan untuk menegakkan kedaulatan Allah yang diimplementasikan pada tindakan praktis, hal itu tetap dapat dilakukan.¹⁷ Hal yang sama juga ditegaskan oleh SB. Warella yang menegaskan bahwa telah terjadi pergeseran dalam sistem politik Israel. Hal itu tampak jelas dalam penjelasannya bahwa, pergeseran berlangsung dalam peta sistem politik Israel, ketika raja Israel tidak menerapkan teokrasi dalam bingkai perjanjian *suzerain vassal*. Hal ini mendorong peneliti kitab Perjanjian Lama dalam hal ini penulis kitab Ulangan mengedepankan nilai kepemimpinan Yahweh melalui hukum tentang raja Ulangan 17:15-20.¹⁸ Sikap seperti ini bertolak belakang dengan tujuan dalam berpolitik praktis. Karena pada umumnya setiap partai politik memiliki tujuan untuk merebut kekuasaan, jabatan, dll. Bahkan mereka berpandangan, untuk dapat berbuat bagi rakyat nanti setelah menang dalam pemilu atau saat menjadi pejabat. Akan tetapi, dalam konteks politik

¹⁴ Adi Putra, “Monarki: Penolakan Terhadap Allah Sebagai Raja,” *Paria: Jurnal Penelitian Kepemimpinan Kristen* 2, no. 1 (2015): 15–30.

¹⁵ Iman Kurniadi and Rohana J Sutjiono, “Latar Belakang Berdirinya Israel Sebagai Sebuah Monarki Pada Zaman Nabi Samuel,” *Semper Reformanda* 4, no. 1 (2022): 8–15.

¹⁶ Yudhy Sanjaya, “Teologi Politik: Politik Praktis Orang Percaya Menurut Roma 13: 1-4 (1)” (2020).

¹⁷ Putra, “Monarki: Penolakan Terhadap Allah Sebagai Raja.”

¹⁸ Sipora Blandina Warella, “Relegiusitas Yahweh Dalam Tranformasi Sistem Politik Israel Zaman PL,” *TANGKOLEH PUTAI* 15, no. 2 (2018): 102–117.

teokrasi, kebenaran dan Firman Allah haruslah menjadi dasar dan prinsip dalam bertindak serta pengambilan kebijakan.

2. Politik teokrasi tidak berbicara jabatan atau kedudukan melainkan melayani satu sama lainnya.

Dalam Matius 20:20-28 (Mrk. 10:34-45), ibu Yakobus dan Yohanes meminta Yesus supaya kedua anaknya itu diberikan jabatan yang istimewa dalam Kerajaan Yesus. Ternyata praktik KKN terjadi bukan baru sekarang melainkan sudah sejak dulu sudah ada KKN. Permintaan ibu Yohanes ini kemudian mendapatkan respons yang keras dari Yesus dengan menegaskan tentang penderitaan-Nya (ay. 23). Bahkan pada ayat 26-27, Yesus berkata: Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Menurut Firman Panjaitan, permintaan ini erat dengan keinginan untuk menjadi 'wakil' dari Yesus yang berkaitan dengan dimilikinya kekuasaan memerintah bagi kedua anaknya sebagai konsekuensi dari penempatan mereka di sisi kanan dan kiri Yesus. Inilah yang menjadi pangkal pertengkaran mereka, karena pada dasarnya para murid yang lain pun sangat menginginkan jabatan dan kuasa tersebut.¹⁹ Di sini Yesus sedang mengajarkan politik kerajaan Allah atau yang saya sebut politik teokrasi. Politik seperti ini sepertinya sulit dipraktikkan oleh politisi-politisi di negara ini. Karena kecenderungan politisi hari ini maunya dilayani dan bukan melayani; maunya jadi bos dan tidak mau jadi pelayan. Prinsip inilah yang juga harusnya dipegang oleh setiap politisi Kristen, supaya ketika menjabat benar-benar mau melayani masyarakat.

Menurut Keener, bagi para murid, pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias dan akan segera memerintah merupakan ungkapan iman (16:17); sayangnya, mereka gagal memahami keseriusan pengorbanan yang menjadi prasyarat bagi kerajaannya (16:12-17). Orang luar mengakui pemerintahan Daud Yesus dalam kebenaran (15:22; 20:30-31), tetapi Yakobus dan Yohanes pada saat ini mungkin berfungsi lebih seperti orang banyak yang mengakui peran Daud Yesus ketika populer (21:9) tetapi tidak menjadi murid tunduk pada pemerintahan Yesus, lebih memilih revolusioner (27:17-25). Matius memberikan sejumlah pelajaran bagi komunitasnya melalui model pemuridan negatif yang disajikan bagian ini.²⁰ Bandingkan dengan pendapat Ferry Pigai.²¹

Ditambahkan oleh Panjaitan, menurut Yesus, seorang pemimpin yang besar adalah seorang pelayan, yaitu orang yang mengadakan pemeliharaan; yang mencukupi kebutuhan orang yang memerlukan bantuan; yang mengorbankan milik dan kepentingannya sendiri untuk kepentingan orang lain, yang memiliki sikap altruis (perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa

¹⁹ Firman Panjaitan, "Kepemimpinan Yesus Kristus Sebagai Model Dasar Kepemimpinan Kristen Berdasarkan Matius 20: 20-28," *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat* 1, no. 2 (2020): 91-110.

²⁰ Craig S. Keener, *A Commentary on the Gospel of Matthew* (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing, 1999), 485.

²¹ Ferry Pigai, "Analisis Ciri Kepemimpinan Hamba Serta Relevansinya Pada Masa Kini Berdasarkan Injil Matius 20: 26-28," *Jurnal Jaffray* 11, no. 1 (2013): 176-198.

memperhatikan diri sendiri) dan tidak egois (perhatian terhadap diri sendiri tanpa mau mempedulikan orang lain). Orang yang terkemuka adalah hamba, yaitu orang yang mengikatkan dirinya untuk mengabdikan bagi orang lain, yang tidak berkuasa atas dirinya sendiri, yang taat, tunduk dan patuh pada aturan untuk melaksanakannya dengan sukacita dan sukarela, yang taat mengabdikan diri kepada siapa yang menjadi tuannya, yang tidak memertahankan gengsi untuk melakukan sesuatu bagi orang lain.²² Dengan demikian, Gereja dalam menjalankan politik teokrasi harus benar-benar dapat menerapkannya dalam prinsip melayani seperti Yesus. Bukan untuk mencari nama, jabatan, kekuasaan, kemudian dengan arogan melakukan banyak tindakan yang justru merugikan masyarakat.

3. Politik teokrasi berarti memberitakan Injil, mengajar, dan melenyapkan berbagai penyakit (trimisi Yesus)

Politik teokrasi menegaskan bahwa gereja bukan hanya berbicara tentang persekutuan orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus. Akan tetapi gereja juga dapat disebut sebagai lembaga politis, dalam hal ini politik teokrasi, karena bukankah gereja merupakan perwujudan pemerintahan Allah di dunia untuk konteks masa kini. Sebagai lembaga politik, gereja haruslah melakukan tugasnya untuk memberitakan Injil, mengajar dan melenyapkan berbagai penyakit. Apabila ada gereja yang tidak lagi menjalankan tiga misi ini maka gereja itu sedang sakit, sebaiknya cepat bertobat supaya tidak mati. Ketiga aktivitas pelayanan (misi) Yesus di Galilea (mengajar, berkhotbah dan menyembuhkan) dapat disimpulkan bahwa hendak menegaskan tentang kehadiran Kerajaan Allah melalui dan oleh kehadiran dan pelayanan Yesus di Galilea. Melalui ketiga aktivitas tersebut, Yesus menyatakan diri-Nya sebagai pribadi yang sangat berkuasa atau berotoritas. Melalui ketiga aktivitas tersebut, Yesus menyatakan diri-Nya sebagai Tuan bagi segala roh-roh jahat dan roh-roh itu tunduk dan takluk di bawah kuasa Yesus. Melalui ketiga aktivitas tersebut, Yesus menyatakan diri-Nya sebagai pengajar yang jauh lebih berotoritas atau berwibawa dari semua pengajar atau ahli Taurat.²³ Dengan demikian, gereja ketika menerapkan politik teokrasi dalam bingkai berkhotbah, mengajar dan menyembuhkan penyakit harus selalu melihat kepada apa yang pernah dan telah dikerjakan oleh Yesus.

4. Politik teokrasi bertujuan merestorasi umat

Muara dari politik teokrasi adalah terciptanya pembaruan yang komprehensif dan menyeluruh untuk mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kalinya dan menegakkan kerajaan Allah di bumi dan langit yang baru. Seperti ketika Yesus melakukan tri misi-Nya, maka hal itu bertujuan untuk

²² Panjaitan, "Kepemimpinan Yesus Kristus Sebagai Model Dasar Kepemimpinan Kristen Berdasarkan Matius 20: 20-28."

²³ Adi Putra, "Tri Misi Yesus: Matius 4:23," in *Berilah Dirimu Didamaikan Dengan Tuhan: Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Ulang Tahun SETIA Ke-27* (Jakarta: Delima, 2014), 15.

terjadinya pertobatan. Seperti yang dikemukakan oleh Putra, konten pengajaran dan khotbah Yesus bertujuan kepada pertobatan penduduk Galilea (terdiri atas: orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain), supaya mereka dapat diselamatkan dari bayang-bayang maut karena dosa. Begitu pula dengan penyembuhan yang Yesus lakukan adalah bertujuan untuk membebaskan penduduk Galilea dari berbagai macam kelemahan atau penyakit fisik; termasuk penyakit yang disebabkan oleh kuasa Setan.²⁴ Artinya, semua yang dilakukan oleh Gereja dalam menjalankan politik teokrasi harusnya mengedepankan tujuan untuk menghasilkan petobat-petobat baru atau melahirkan transformasi dalam hidup setiap jemaat atau pun masyarakat secara umum. Sehingga cita-cita dan tujuan Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan-Nya, manusia dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai duta atau perwakilan Allah di dalam dunia.

Politik Gereja adalah Politik Teokrasi

Memang dalam Alkitab tidak dijumpai secara gamblang tentang pernyataan bahwa Tuhan Yesus memerintahkan Gereja-Nya untuk berpolitik praktis. Namun seperti yang dijelaskan oleh Robert Borrang bahwa, walaupun Yesus tidak pernah membentuk Gereja atau partai politik, tetapi Yesus aktif melakukan gerakan moral untuk membarui, memperbaiki, bahkan dengan cara-cara damai Dia pernah menggoyangkan kemapanan dan status quo pada zamannya. Selama hidup dan pelayanan di dunia ini, tiga setengah tahun, Yesus berjuang tanpa rasa takut menentang kejahatan dan ketidakadilan. Mengecam kekuasaan yang menindas orang kecil. Yesus juga menentang kekuasaan Sanhedrin dan Imam Kepala yang wewenang-wenang atas terhadap bangsa mereka sendiri.²⁵ Apabila memahami Alkitab dengan benar, maka sebenarnya di sana dapat ditemukan prinsip bahwa Allah tidak melarang umat-Nya untuk berpolitik, karena sejatinya politik itu dilakukan untuk kebaikan seluruh umat manusia. Christopher Wright mengatakan, pasal-pasal pertama Kitab Kejadian menyajikan keprihatinan Allah yang mendalam mengenai kehidupan politik: kadang-kadang Ia melibatkan diri langsung di dalamnya, baik dalam hubungan-hubungan antar-bangsa maupun dalam politik kerajaan-kerajaan kecil di lembah Yordan.²⁶

Peneliti setuju bahwa Allah telah menunjukkan sikap politiknya sejak pasal-pasal awal kitab Kejadian bahkan sejak penciptaan. Hal itu terlihat dalam kisah penciptaan manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan-Nya. Hal itu dilakukan-Nya untuk menunjukkan bahwa Dia berdaulat atas seluruh dunia ini. Dan tugas manusia di dunia ini menjadi wakil Allah. Dan sistem politik seperti ini dapat disebut sebagai politik teokrasi. Politik teokrasi ini kemudian identik dengan pemerintahan teokrasi. Sebelum bangsa Israel menjadi sebuah negara monarki, mereka memiliki pemerintahan

²⁴ Ibid.

²⁵ Robert Borrang, *Etika Politik Kristen: Serba-Serbi Politik Praktis* (Jakarta: UPI dan PSE, 2006), 12.

²⁶ Christopher Wright, *Hidup Sebagai Umat Allah: Etika Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 109.

teokrasi.²⁷ Masa teokrasi itu berlangsung sejak *exodus* dari Mesir sampai kepada penobatan seorang raja (bdk. Kel. 19:4-6; 1Sam. 8:7). Itulah sebabnya pada masa itu, bangsa Israel tidak memiliki ‘raja manusia’, karena Raja mereka adalah Tuhan. Akan tetapi di bumi, Tuhan memiliki ‘perpanjangan tangan’ seperti: para nabi yang seringkali disebut sebagai juru bicara Tuhan. Melalui para nabi inilah, Tuhan menjalankan roda pemerintahan secara teokrasi.

Argumentasi di atas dikuatkan dengan bukti-bukti Alkitab (Perjanjian Lama) tentang aktivitas politis yang Tuhan kerjakan melalui para nabi-Nya. Seperti: (1) Tuhan mengumumkan undang-undang [Kel.20:1-23:33; Ul. 5: 22,23]; (2) Tuhan menuntun bangsa Israel [Kel. 40:36-37; Bil. 8:17-23]; (3) Tuhan yang mengumumkan perang [Kel. 17: 14-16; Bil. 31:1-3; Yos. 6:2,3; 8:1]; (4) Tuhan yang mengangkat pegawai pemerintahan [Kel. 3:10; Bil. 27: 18, 20]; (5) Tuhan yang mengangkat pejabat dalam Bait Suci [Kel. 28:1; 40: 12-15]; (6) Tuhan membagi tanah yang ditaklukkan [Yos. 13: 1-7]; (7) Tuhan mendapat upeti atau persembahan [Kel. 35:4-29; Im. 27:30; Ul. 16:16; 26:1-4].²⁸ Dari beberapa poin ini yang juga didukung oleh informasi dan data dari Alkitab, terlihat jelas bahwa Allah juga terlibat dalam politik, yang mana dalam penelitian ini disebut sebagai politik teokrasi. Lalu, apakah Yesus juga berpolitik? Prof. Dr. Warsito Utomo (seorang pakar Politik UGM) menyatakan bahwa Yesus tidak pernah terlibat dalam politik praktis, melainkan politik etik.²⁹ Kalau meneliti dengan baik teks-teks Perjanjian Baru maka kita dapat berkata bahwa Yesus tidak hanya sekadar menjalankan sebuah politik etis melainkan politik teokrasi.

Pada beberapa kesempatan dapat dilihat tendensi itu. Misalnya dalam Yohanes 6:15, setelah mengadakan mujizat dengan memberi makan 5000 orang, maka orang banyak mendesaknya untuk menjadi raja, tetapi Yesus malah menyingkir ke gunung. Kemudian dalam pengajaran-pengajaran yang dikemukakan dan diajarkan oleh-Nya yang berpusat pada Kerajaan Allah selalu bertolak belakang dengan apa yang dicari oleh manusia pada umumnya dalam politik praktis. Bahkan politik teokrasi yang dikerjakaan Yesus ini mencapai titik puncaknya saat Yesus harus mati tergantung di atas kayu salib. Dan kepada Pilatus, Yesus menegaskan bahwa kerajaan-Nya bukan dari dunia ini (Yoh. 18:36). Menunjukkan sebuah prinsip politik teokrasi yang dijalankan oleh Yesus.

Pendapat di atas juga didukung dan disetujui oleh Sipahutar, seperti yang tampak dalam penjelasannya berikut, istilah Teokrasi berakar dari Bahasa Yunani “*theokratia*” (theo artinya: Allah, kratos: kuasa/pemerintahan) yang diterjemahkan menjadi “Pemerintahan Allah” atau sering disebut dengan “Kerajaan Allah” (*the Kingdom of God*). Teokrasi sesungguhnya menunjuk kepada pemerintahan oleh Allah dalam bentuk penyertaan dan pertolongan Allah atas umat-Nya. Secara khusus lebih mengarah pada makna spiritual, yaitu Allah menjadi Raja atas umat-Nya. Kerajaan

²⁷ Pemerintahan teokrasi adalah pemerintahan yang dipimpin langsung oleh Tuhan. Kata "teokrasi" berasal dari bahasa Yunani, θεοκρατία (*theokratia*). θεος (*theos*) artinya “Tuhan” dan κρατειν (*kratein*) “memerintah”. Teokrasi artinya “pemerintahan oleh Tuhan”.

²⁸<http://alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Pemerintahan%20Allah%20%28Teokrasi%29>02/02/2012.

²⁹ Gunche Lugo, *Manifesto Politik Yesus* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2009), xiii-xiv.

Allah atau pemerintahan Allah menekankan sikap dan kehidupan yang tunduk dan taat kepada Allah.³⁰

Penerapan Politik Teokrasi Gereja

Politik teokrasi dapat dilakukan dalam dua bentuk, yakni: dilakukan oleh dan di dalam gereja dan dilakukan dalam ranah politik praktis. Itulah sebabnya, dapat dikatakan bahwa Gereja secara holistik harus berperan aktif dalam politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Dilakukan oleh dan di dalam gereja

Melalui Gereja, dapat dilakukan penginjilan dan tindakan-tindakan misi lainnya termasuk tri misi Yesus di atas. Tujuannya adalah mengembalikan (restorasi) umat kepada Allah. Bahkan gereja juga melakukan pengkaderan pemimpin bangsa, berdoa bagi bangsa dan melakukan tindakan-tindakan sosial demi menyebarkan kasih Kristus kepada semua orang. Seperti yang dikatakan oleh. Ngelow, politik gereja itu adalah pelayanan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan keadilan serta kesejahteraan bagi semua orang, yang terjalin dengan kepentingan bersama seluruh warga masyarakat (Yer. 29:7).³¹ Fransiska dan Ni Nyoman mengatakan, melalui nabi Yeremia, mengajarkan agar setiap orang turut bertanggungjawab untuk membangun kesejahteraan kota di mana ia ditempatkan oleh Tuhan (Yer. 29:4-7 ; Rm. 13:1- 7).³² Peneliti setuju dengan pandangan di atas, karena sejatinya Gereja harus memperjuangkan kebenaran untuk dapat ditegakkan dengan benar sehingga berdampak pada terciptanya kemakmuran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dan itulah politik yang harusnya dikerjakan oleh Gereja.

Perintah untuk mengusahakan kesejahteraan kota Babel dalam Yeremia 29:7 dianggap tidak lazim. Tetapi ini harus dipahami sebagai kepedulian terhadap kesejahteraan umat. Pfeiffer dan Harrison mengatakan bahwa kepatuhan orang Yahudi pada prinsip kesetiaan kepada pemerintahan negara di mana mereka hidup adalah salah satu alasan mengapa mereka dapat bertahan hidup sampai kini.³³ Ada dua perintah yang seharusnya dikerjakan umat Tuhan terhadap wilayah di mana dia tinggal yaitu: *wedirshu et shelom ha'ir* (mengusahakan kesejahteraan kota) dan *hitpalelu* (berdoa). Kata kerja imperatif *dirshu* berasal dari kata dasar *darash* yang artinya “mencari, menyelidiki, mengupayakan”. Apa yang diupayakan atau apa yang dicari? *Shalom* terhadap kota. Kata Ibrani “*shalom*” dalam Yeremia 29:7 diterjemahkan *peace and prosperity (New English Translation)*, *peace (King James Version)* atau *welfare (Complete Jewish*

³⁰ Roy Charly Sipahutar, “Teokrasi Dan Demokrasi: Komparasi Reflektif Teokrasi Israel Kitab Suci Dengan Demokrasi Langsung Di Indonesia,” *Tangkoleh Putai* 15, no. 2 (2018): 86–101.

³¹ Zakaria J. Ngelow, “Beberapa Catatan Mengenai Politik Kristen Di Indonesia,” in *Teologi Politik: Panggilan Gereja Di Bidang Politik Pascaorde Baru* (Makassar: Yayasan Oase INTIM, 2013), 27.

³² Fransiska, “Entitas Gereja Dalam Berpolitik Di Indonesia (Tinjauan Sudut Etika Kristen).”

³³ Charles F. Pfeiffer dan Everett F. Harrison, *Tafsiran Alkitab Wycliffe Volume 2* (Malang: Gandum Mas, 2014), 18.

Bible).³⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap warga gereja yang mempraktikkan politik teokrasi harus memperhatikan bahwa fokus politik mereka adalah mengusahakan kesejahteraan kota dan mendoakan kota di mana mereka tinggal. Sehingga melalui tindakan tersebut maka kebenaran dan keadilan bahkan kedaulatan Allah dapat ditegakkan di tengah-tengah masyarakat dan negara.

Menurut Gultom, di dalam politik konteks Indonesia, hubungan gereja dan negara mengalami fluktuatif dan kompleksitas sebagaimana faktor-faktor politik, sosial dan agama begitu kuat terlibat. Partisipasi Gereja dalam pembangunan masyarakat memang masih kurang dan lemah.³⁵ Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi Gereja. Di mana pelaksanaan politik teokrasi harus berjalan kondusif dan efektif untuk peningkatan kesejahteraan umat, masyarakat hingga bangsa.

Pada bagian ini, politik teokrasi juga dapat diimplementasikan berupa pengkaderan politisi dalam gereja. Kaderisasi pemimpin adalah orang yang dididik untuk melanjutkan tongkat estafet suatu partai atau organisasi sehingga dapat diserahi tugas kepemimpinan di kemudian hari. Menurut Saputra, kaderisasi adalah proses penyiapan sumber daya manusia agar dapat menjadi pemimpin yang mampu berperan dan berfungsi lebih baik di kemudian hari.³⁶ Proses kaderisasi melalui proses pendidikan yang berkesinambungan agar dapat menggantikan pemimpin yang lama. Kader merupakan orang yang diharapkan memegang peranan penting dalam sebuah organisasi.³⁷ Dengan demikian politik teokrasi dapat dilakukan oleh gereja dengan menggalakkan penginjilan serta penegakan kebenaran pada tempat yang semestinya, serta dapat juga dilakukan dengan cara gereja melakukan kaderisasi politisi (melakukan pendidikan politik). Supaya setiap politisi yang dikirim ke parpol adalah orang-orang yang memang memiliki integritas dan bisa menjalankan fungsinya sebagai Gereja Kristus.

2. Dilakukan dalam politik praktis

Pada bagian ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari poin sebelumnya. Di mana Gereja yang telah melakukan kaderisasi pemimpin, maka akan menyumbangkan politisi yang berintegritas dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran berdasarkan ajaran Alkitab. Apabila setiap politisi Kristen yang dihasilkan dari kaderisasi dalam gereja dapat berjalan menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh kejujuran maka pasti cita-cita terciptanya bangsa yang makmur dan sejahtera pasti dapat terwujud. Selain itu, bagian ini juga hendak menegaskan bahwa gereja harus berperan serta dalam mendukung berjalannya pemerintahan secara baik.

³⁴ Tuter P T Panjaitan, "Tanggung Jawab Umat Tuhan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Kajian Biblika Perjanjian Lama," *HAGGADAH: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2020): 55–64.

³⁵ Junifrius Gultom, *Teologi Misi Pentakostal* (Jakarta: Bethel Press, 2015), 204.

³⁶ Tamara Roni Saputra, "Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Penajam Utara, Paser Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2009," *eJournal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (2014): 1829–1841.

³⁷ Ni Kadek Defvin Setyawati, Gatut Prijowidodo, and Inri Inggrit, "Pola Komunikasi Organisasi PDI Perjuangan Dalam Proses Kaderisasi Di DPC Kabupaten Sidoarjo," *Scriptura* 8, no. 1 (2018): 30–40.

Gereja harus mendukung program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah, memberikan masukan atau kritikan apabila ada kebijakan yang keliru, hingga menganjurkan kepada warga jemaat untuk membayar pajak. Misalnya ketika ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka Gereja tidak boleh langsung memprotes atau menolak kebijakan tersebut. Sebaiknya gereja melakukan kajian yang mendalam terhadap kebijakan tersebut untuk menemukan kelebihan dan kekurangannya. Apabila ternyata dalam hasil kajian ditemukan kelemahan, maka Gereja wajib untuk menyampaikannya secara baik dan berhikmat kepada pemerintah dan terus mengawalinya hingga tercipta keadilan bagi masyarakat serta kebenaran dapat ditegakkan. Sedangkan perihal pajak, Gereja juga harus selalu aktif menganjurkan warga jemaat untuk tertib membayar pajak. Oleh karena dengan warga jemaat membayar pajak maka secara tidak langsung gereja telah mendukung setiap program pemerintah dan warga jemaat dapat berperan serta dalam pembangunan nasional demi terciptanya kesejahteraan kota. Pendapat ini didukung oleh Asina Rohana Nadeak yang mengatakan, perspektif alkitabiah terhadap kesadaran gereja membayar pajak adalah cara pandang yang berasal dari Alkitab atau sama dengan prinsip Alkitab terhadap perasaan yakin setiap kelompok orang untuk mengembalikan sejumlah uang yang merupakan hak atau milik pemerintah Membayar pajak merupakan perintah Tuhan Yesus kepada umat-Nya.³⁸

Simpulan

Setelah menjelaskan secara panjang lebar tentang politik di dalam gereja, maka berikut ini akan diuraikan beberapa kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini. Pertama, Gereja sebagai institusi dan personal tidak boleh mengasingkan diri dari dunia politik. Kedua, politik yang seharusnya dipraktikkan dalam dan oleh Gereja adalah politik teokrasi. Ketiga, sifat politik Gereja yang disebut sebagai politik teokrasi adalah menegakkan kedaulatan dan kehendak Allah di dalam dunia, tidak berbicara jabatan atau kedudukan melainkan melayani satu sama lainnya, politik teokrasi berarti memberitakan Injil, mengajar, dan melenyapkan berbagai penyakit (trimisi Yesus), dan politik teokrasi bertujuan merestorasi umat. Keempat, implementasi dari politik teokrasi dapat dilakukan di dalam Gereja dan di luar Gereja (politik praktis).

Daftar Pustaka

- Berkhof, Louis. *Teologi Sistematis 1 – Doktrin Allah*. Surabaya: Momentum, 1993.
- Borrong, Robert. *Etika Politik Kristen: Serba-Serbi Politik Praktis*. Jakarta: UPI dan PSE, 2006.
- Evans, Tony. *Teologi Allah: Allah Kita Maha Agung*. Malang: Gandum Mas, 1999.
- Fransiska, Ni Nyoman. "Entitas Gereja Dalam Berpolitik Di Indonesia (Tinjauan Sudut Etika Kristen)." *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* (2018): 1–15.

³⁸ Asina Rohana Nadeak, "Perspektif Alkitabiah Dalam Kesadaran Jemaat Membayar Pajak Menurut Matius 22: 15-22," *Artikel Jurnal HITS* (2019): 1–13.

- Gianto, Gianto. “Hamba Tuhan Dan Politik Praktis: Kajian Teologis-Etis Terhadap Panggilan Hamba Tuhan Dan Keterlibatannya Dalam Politik Praktis Dalam Konteks Indonesia.” *Coram Mundo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 2 (2021): 59–64.
- Gultom, Junifrius. *Teologi Misi Pentakostal*. Jakarta: Bethel Press, 2015.
- Harrison, Charles F. Pfeiffer dan Everett F. *Tafsiran Alkitab Wycliffe Volume 2*. Malang: Gandum Mas, 2014.
- Jo, Haris. “Bolehkah Gereja Berpolitik?” *Rubrik Kristen*. Last modified 2022. Accessed March 21, 2023. <https://rubrikkristen.com/bolehkah-gereja-berpolitik/>.
- Keener, Craig S. *A Commentary on the Gospel of Matthew*. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing, 1999.
- Kurniadi, Iman, and Rohana J Sutjiono. “Latar Belakang Berdirinya Israel Sebagai Sebuah Monarki Pada Zaman Nabi Samuel.” *Semper Reformanda* 4, no. 1 (2022): 8–15.
- Lugo, Gunche. *Manifesto Politik Yesus*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2009.
- Miraji, Theodorus. “Pengaruh Keadaan Politik Terhadap Konsep Kerajaan Mesianik Pada Masa Intertestamental.” *LOGIA: Jurnal Teologi Pentakosta* 2, no. 1 (2020): 42–61.
- Nadeak, Asima Rohana. “Perspektif Alkitabiah Dalam Kesadaran Jemaat Membayar Pajak Menurut Matius 22: 15-22.” *Artikel Jurnal HITS* (2019): 1–13.
- Ngelow, Zakaria J. “Beberapa Catatan Mengenai Politik Kristen Di Indonesia.” In *Teologi Politik: Panggilan Gereja Di Bidang Politik Pascaorde Baru*. Makassar: Yayasan Oase INTIM, 2013.
- Panjaitan, Firman. “Kepemimpinan Yesus Kristus Sebagai Model Dasar Kepemimpinan Kristen Berdasarkan Matius 20: 20-28.” *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat* 1, no. 2 (2020): 91–110.
- Panjaitan, Tuter P T. “Tanggung Jawab Umat Tuhan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Kajian Biblika Perjanjian Lama.” *HAGGADAH: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2020): 55–64.
- Pendapa, LPM. “Pandangan Masyarakat Mengenai Politik.” *Pendapa.Com*. Last modified 2016. Accessed March 21, 2023. <https://lmpmendapa.com/opini/pandangan-masyarakat-mengenai-politik/>.
- Pigai, Ferry. “Analisis Ciri Kepemimpinan Hamba Serta Relevansinya Pada Masa Kini Berdasarkan Injil Matius 20: 26-28.” *Jurnal Jaffray* 11, no. 1 (2013): 176–198.
- Putra, Adi. “Monarki: Penolakan Terhadap Allah Sebagai Raja.” *Paria: Jurnal Penelitian Kepemimpinan Kristen* 2, no. 1 (2015): 15–30.
- . “Tri Misi Yesus: Matius 4:23.” In *Berilah Dirimu Didamaikan Dengan Tuhan: Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Ulang Tahun SETIA Ke-27*. Jakarta: Delima, 2014.
- Sanjaya, Yudhy. “Teologi Politik: Politik Praktis Orang Percaya Menurut Roma 13: 1-4 (1)” (2020).
- Saputra, Tamara Roni. “Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Penajam Utara, Paser Calon Anggota

- Legislatif Dalam Pemilu 2009.” *eJournal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (2014): 1829–1841.
- Sembiring, William Wahyu. “Kajian Historis-Kritis Tentang Teokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Teologi Gracia Deo* 5, no. 1 (2022): 87–107.
- Setyawati, Ni Kadek Defvin, Gatut Prijowidodo, and Inri Inggrit. “Pola Komunikasi Organisasi PDI Perjuangan Dalam Proses Kaderisasi Di DPC Kabupaten Sidoarjo.” *Scriptura* 8, no. 1 (2018): 30–40.
- Simamora, Adolf Bastian. “Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia.” *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2, no. 1 (2018).
- Sipahutar, Roy Charly. “Teokrasi Dan Demokrasi: Komparasi Reflektif Teokrasi Israel Kitab Suci Dengan Demokrasi Langsung Di Indonesia.” *Tangkoleh Putai* 15, no. 2 (2018): 86–101.
- Tambunan, Daulat. ““Bolehkah Gereja Berpolitik?”” *Binus University*. Last modified 2021. Accessed March 21, 2023. <https://binus.ac.id/character-building/2021/02/bolehkah-gereja-berpolitik/>.
- Uwe Flick, Ernst von Kardoff, Ines Steinke. “Apakah Penelitian Kualitatif? Pengantar Bidang Kajian.” In *Buku Induk Penelitian Kualitatif: Paradigma, Teori, Metode, Prosedur Dan Praktik*, edited by Ernst von Kardoff dan Ines Steinke Uwe Flick. Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2017.
- Warella, Sipora Blandina. “Relegiusitas Yahweh Dalam Tranformasi Sistem Politik Israel Zaman PL.” *TANGKOLEH PUTAI* 15, no. 2 (2018): 102–117.
- Wright, Christopher. *Hidup Sebagai Umat Allah: Etika Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.